

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR PELAPORAN KEUANGAN,
PERAN INTERNAL AUDIT, KOMPETENSI, PEMANFAATAN
INFORMASI AKUNTANSI, *GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE*, DAN
KUALITAS APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN**
(Studi Empiris pada OPD Kabupaten Temanggung)

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1**



**Disusun Oleh:
Yuni Riyanti
NPM 15.0102.0019**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2022**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik, telah mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2002).

Berdasarkan PP Nomor 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, agar laporan keuangan dapat memenuhi tujuannya diperlukan karakteristik kualitatif, karakteristik yang dimaksud adalah laporan keuangan harus relevan, yaitu informasi harus andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keteran dalam pelaporan keuangan pemerintah, yaitu kapasitas sumberdaya manusia, pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), asimetri informasi, dan komitmen organisasi.

Sumber daya manusia merupakan elemen utama dibandingkan yang lain. Menurut Susilo (2002), sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi, misi, dan tujuannya. Pengendalian internal pada pemerintah pusat dan daerah

dirancang dengan berpedoman pada PP Nomor 30 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam proses akuntansi. Hal lain yang mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah perlunya optimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi.

Selain itu, pengawasan keuangan daerah dapat juga membantu pemerintah dalam mengontrol kegiatan-kegiatan SKPD dalam menggunakan anggaran dan Menyusun laporan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) juga menjadi factor dalam penyajian laporan keuangan karena dapat memberikan informasi akuntansi kepada pemakai tentang posisi keuangan. Perbedaan informasi antara atasan dan bawahan atau disebut juga dengan asimetri informasi, serta komitmen organisasi juga menjadi faktor lain dalam mengetahui keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Masih banyaknya fenomena laporan keuangan pemerintah yang belum menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah membuat tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government governance*) meningkat. Hal itu juga yang telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Harus disadari bahwa ada banyak pihak yang akan

mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Bedasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan provinsi Jawa Tengah tanggal 25 mei 2021, Kabupaten Temanggung mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk yang ke 9 kalinya ,dengan capaianangka 92,41 persenter tinggi se Jateng, di mana jumlah tersebut di atas rata-rata Jateng yakni, 80 persen dan di atas rata-rata nasional 75,60 persen. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI tidak lepas dari penyusunan laporan keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang disajikan berbagai satuan kerja maupun organisasi perangkat daerah yang ada. Kecukupan pengungkapan, kepatuhan, terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas system pengendalian internal dan terwujudnya koordinasi yang baik dengan semua OPD dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga kabupaten Temanggung mendapatkan opini WTP yang ke Sembilan .

Penelitian sebelumnya (Yasma,2019) berdasar kanalisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil simpulan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, penerapan system akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, peran internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (Paramita, 2017) hasil uji t menunjukkan bahwa penerapan

standar pelaporan keuangan, kompetensi, serta pemanfaatan system informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan, sedangkan karakteristik kepemimpinan dan peran audit internal tidak berpengaruh terhadap dihasilkannya laporan keuangan yang berkualitas.

Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini akan menambahkan variabel tentang *Good Government Governance*, Kualitas Aparatur Sipil Negara Dan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Penelitian ini mengembangkan dari penelitian Amalia,dkk (2019) dengan persamaan penelitian dan alat analisis sedangkan perbedaannya adalah **pertama**, menambah variable *Good Governmen Governance* dan Kualitas Aparatur Sipil Negara, karena tata Kelola pemerintah yang baik menuju pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Good governance sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik atau sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran dari salah alokasi dan investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Kusmayandi 2009).

Pengaruh *good governance* terhadap kualitas layanan public menurut *Indonesian governance index* (IGI), *governance* adalah suatu proses dalam rangka memformulasikan dan mengimplementasikan aturan-aturan, ketentuan-ketentuan dan priotias-prioritas pembangunan melalui interaksi di antara para

eksekutif dan para anggota legislative serta melalui birokrasi dengan partisipasi dari masyarakat sipil maupun masyarakat ekonomi. Penilaian IGI dalam pelaksanaan prinsi *pgood governance* meliputi *Participation* (keikutsertaan), *Fairrness* (kewajaran), *Accountability* (kebertanggungjawaban), *Transparancy* (keterbukaan), *Efficiency* dan *Effectiveness* (efektif). Asian Development Bank menegaskan adanya consensus umum bahwa *Good Governance* dilandasi oleh 4 (empat) pilar, yaitu : *accountability, transparency, participation, effectiveness and efficiency*. Munculnya konsep *Good Governance* di Indonesia sebagai reaksi atas perilaku pengelolaan perusahaan yang tidak memperhitungkan stakholder- nya.

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Dewasa ini, perkembangan terbaru memandang karyawan bukan sebagai sumber daya belaka, melainkan lebih berupa modal atau asset bagi institusi atau organisasi. Karena itu kemudian munculah istilah baru di luar H.R. (*Human Resources*), yaitu H.C. atau *Human Capital*. Di sini SDM dilihat bukan sekedar sebagai asset utama, tetapi aset yang bernilai dan dapat dilipat gandakan, dikembangkan (bandingkan dengan portfolio investasi) dan juga bukan sebaliknya sebagai liability (beban, *cost*).

kompetensi yang dimiliki oleh pegawai pengelola keuangan akan mempengaruhi tingkat kualitas laporan keuangan yang akan dihasilkan. Jika kompetensi sumber daya manusia dilaksanakan dengan baik, maka kualitas laporan keuangan daerah akan meningkat, sehingga laporan keuangan yang

baik dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Dengan demikian kompetensi sumber daya manusia ditunjukkan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dapat diterapkan (Yuliani 2016).

Kedua, Objek penelitian OPD Pemda Temanggung karena sebagai peraih hopini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 9 tahun berturut-turut mulai tahun 2012 sampai tahun 2020. Berdasarkan Ikhtisar hasil pemeriksaan LKPD tahun 2020 dari BPK perwakilan provinsi Jawa Tengah perkembangan opini atas 36 LKPD tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal tersebut ditunjukkan kenaikan opini atas 36 LKPD.



Sumber : (www.jateng.bpk.go.id)

B. Rumusan Masalah

1. Apakah penerapan standar pelaporan keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah peran internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah?

3. Apakah kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah?
4. Apakah *Good Government Governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah?
5. Apakah kualitas aparatur sipil Negara dan pemanfaatan informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah?

C. Tujuan Penelitian

1. Menguji dan menganalisis pengaruh penerapan standar pelaporan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan
2. Menguji dan menganalisis pengaruh peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan
3. Menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan
4. Menguji dan menganalisis pengaruh *Good Government Governance* terhadap kualitas laporan keuangan
5. Menguji dan menganalisis pengaruh kualitas aparatur ASN dan pemanfaatan informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan dan menguji kemampuan mahasiswa mengenai pengaruh audit keuangan pemerintah terhadap tingkat korupsi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menerapkan teori yang telah diperoleh di perkuliahan dan menambah wawasan penulis dengan memberikan pengetahuan tentang pengaruh audit keuangan pemerintah terhadap tingkat korupsi Indonesia.

b. Bagi Pemerintah

Memberikan masukan kepada pemerintah untuk lebih baik dalam mengelola keuangan negara dan memberikan laporan keuangan dengan jujur.

c. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat menambah referensi untuk perpustakaan Universitas Muhammadiyah Magelang, serta dapat menambah pengetahuan dan informasi pembaca khususnya mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang sama.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yaitu gambaran yang jelas tentang urutan penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi alasan memilih judul penelitian berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka Dan Perumusan Hipotesis

Berisi teori sebagai dasar untuk menganalisa pokok-pokok masalah dalam penelitian berupa telaah teori, hasil penelitian terdahulu, hipotesis dan model penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Berisi gambaran dan tahapan penelitian yang menjelaskan tentang populasi, sampel, metode pengambilan sampel, definisi operasional, pengukuran variabel dan metode analisis data.

BAB IV Hasil Dan Pembahasan

Berisi analisis data dan pembahasan. Bagian ini menjadi titik perhatian karena dilakukan pengolahan dan analisis data menggunakan bantuan program SPSS berupa analisis deskriptif, uji validitas dan reliabilitas data, analisis regresi dan pengujian hipotesis.

BAB V Kesimpulan

Bab ini merupakan bagian akhir dari penyusunan skripsi yang berisikan kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaah Teori

1. Teori Keagenan

Dalam Teori keagenan terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan yaitu hubungan yang muncul ketika satu pihak (principal) memberikan atau mendelegasikan kewenangan dan tanggungjawab kepada pihak lain (agent) untuk melakukan pengambilan keputusan. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan pendelegasian terjadi Ketika seseorang atau satu kelompok orang (prinsipal) memilih orang atau kelompok lain (agen) untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Hal ini dapat dilihat juga dalam proses pengawasan pengelolaan keuangan negara pada system pemerintahan di Indonesia.

Hendriksen dan Van Breda (2002) dalam Setyawati (2010), hal yang mendasari konsep teori keagenan muncul dari perluasan dari satu individu pelaku ekonomi informasi menjadi dua individu. Salah satu individu ini menjadi agent untuk yang lain yang disebut principal. Agent membuat kontrak untuk melakukan tugas-tugas tertentu bagi principal, principal membuat kontrak untuk memberi imbalan pada agent. Principal mempekerjakan agent untuk melakukan tugas untuk kepentingan principal, termasuk pendelegasian otoritas pengambilan keputusan dari principal ke agent.

Scott (2000) menyatakan bahwa inti dari Agency Theory atau teori keagenan adalah pendesainan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen dalam hal terjadi konflik kepentingan.

2. Pengendalian Internal

Menurut Romney dan Steinbart (2015) pengendalian internal adalah sebuah proses yang diimplementasikan untuk memberikan jaminan yang memenuhi beberapa objektif dari pengendalian internal, diantaranya yaitu menjaga aset, menjaga catatan dalam detail yang cukup untuk pelaporan asset perusahaan yang tepat dan akurat, menyediakan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, menyiapkan laporan keuangan dengan kriteria yang ditentukan, mendorong dan meningkatkan efisiensi operasional, mendorong ketaatan dalam hal manajerial, dan memenuhi persyaratan dari regulasi dan peraturan yang ada. Sistem pengendalian internal pemerintah, di dalamnya terdapat pengawasan intern. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pemimpin dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pengendalian internal perlu diterapkan di sebuah perusahaan maupun instansi pemerintah, hal tersebut bertujuan untuk meminimalisasi penyelewengan yang dilakukan oleh pihak tertentu. Menurut Bambang

Hartadi (1992) pengertian pengendalian internal dalam arti sempit merupakan prosedur-prosedur yang dilakukan untuk memeriksa ketelitian data. Sedangkan dalam arti luas, system pengendalian internal merupakan sebuah system sosial yang mempunyai makna khusus yang berada di perusahaan.

Menurut Mulyadi (2002) pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dan efektifitas operasi. Pengendalian internal sangat penting dalam organisasi untuk meminimalisir terjadinya kecurangan pengendalian internal yang dilakukan secara efektif akan menutup peluang terjadinya kecenderungan untuk berlaku curang dalam akuntansi (Adelin dan Fauzi hardani, 2013).

3. Ketaatan Aturan Akuntansi

Hery (2013) standar akuntansi mencakup konvensi, peraturan, dan prosedur yang telah disusun dan di sahkan oleh sebuah lembaga resmi (badan pembentuk standar) pada saat tertentu. Standar ini merupakan tentang cara pencatatan sumber-sumber ekonomi, kewajiban, modal, pendapatan, biaya, dan pelaporannya dalam bentuk laporan keuangan. Ada dua kebutuhan yang berkepentingan terhadap hasil laporan keuangan yaitu pihak ekstern dan pimpinan sealaku pihak pengelola keuangan dan pengelola aset dan penyajian laporan keuangan. Dari pihak esktern pemakai laporan keuangan terdiri dari: investor, kreditor, pemasok, masyarakat,

pemerintah, pelanggan. Mereka memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda yang harus dipenuhi, secara teoritis, ketaatan akuntansi juga merupakan kewajiban yang harus diterapkan oleh masing-masing organisasi.

Menurut Rahmawati (2012), aturan merupakan tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Aturan akuntansi dibuat sedemikian rupa sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam standar akuntansi terdapat aturan-aturan yang harus digunakan dalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan yang berpedoman terhadap aturan-aturan yang dikeluarkan oleh IAI. Informasi yang tersedia dilaporan keuangan sangat dibutuhkan bagi investor dan manajemen jadi harus dapat diandalkan. Sehingga dibutuhkan suatu aturan untuk menjaga keandalan informasi tersebut dan menghindari tindakan yang dapat merugikan perusahaan atau organisasi.

Ada dua kebutuhan yang berkepentingan terhadap hasil laporan keuangan yaitu pihak pemakai (pihak ekstern) dan pimpinan selaku pihak pengelola aset dan penyaji laporan keuangan Thoyibatun (2009). Dari pihak ekstern, pemakai laporan keuangan terdiri atas: investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok, kreditor, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Mereka memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda yang harus dipenuhi. Agar menghasilkan informasi yang berkualitas, maka penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan prosedur dan prinsip serta aturan kerja yang sesuai dengan prinsip akuntansi. Prinsip-

prinsip akuntansi merupakan sejumlah aturan yang menjadi pedoman bertindak dalam melaksanakan akuntansi di perusahaan.

4. Kompetensi

Kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebagai sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior di tempat kerja atau pada situasi tertentu. Kompetensi merupakan perilaku atau perbuatan seseorang meliputi kemampuan umum, ketrampilan dan pengetahuan tentang kebijaksanaan aturan dan pedoman pelaksanaan tugas (Sawyer (2005). Menurut Mathis.L.Robert & Jackson (2001), kompetensi adalah karakteristik dasar yang dapat dihubungkan dengan pencapaian kinerja individu dan tim, terdiri dari pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan kemampuan (*capability*).

Kemampuan (*capability*) merupakan bagian dari kompetensi. Model fraud diamond theory yang dikembangkan oleh Wolfe dan Hermanson (2004) menggambarkan kemampuan (*capability*) dalam enam komponen, yaitu: (1) posisi atau fungsi dalam organisasi (*position/function*), (2) kecerdasan/keahlian (*brains*), (3) keyakinan/ego (*confidence/ego*), (4) kemampuan untuk memaksa orang lain (*coercion skills*), (5) kemampuan untuk berbohong (*effective lying*), dan (6) kemampuan untuk mengelola stres (*immunity to stress*).

Spencer dan Spencer (1993) menyusun kelompok kompetensi dalam enam cluster, yaitu: (1) kompetensi berprestasi dan tindakan (*achievement and action*); (2) kompetensi melayani (*helping human service*); (3) kompetensi memimpin (*influence*); (4) kompetensi mengelola (*managerial*); (5) kompetensi berfikir (*cognitive*); dan (6) kompetensi kepribadian efektif (*personal effectiveness*).

B. Telaah Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Variabel	Hasil Penelitian
1	Sutisman (2020)	Komitmen Organisasi, Kompetensi Sdm Dan Teknologi Informasi	Komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap implementasi SAP berbasis akrual, implementasi SAP berbasis akrual memediasi hubungan komitmen organisasi dan kualitas laporan keuangan dengan arah positif, implementasi SAP berbasis akrual tidak memediasi hubungan kompetensi sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan dan implementasi SAP berbasis akrual memediasi hubungan peran teknologi informasi dan kualitas Laporan keuangan dengan arah positif pada Pemerintah.
2	Zai (2020)	Good Government Governance dan Kompetensi Sumber Daya Manusia	Penelitian menunjukkan bahwa GGG memengaruhi signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan dan kompetensi sumber daya manusia memengaruhi signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Secara bersama-sama GGG dan kompetensi sumber daya manusia memengaruhi signifikan kualitas informasi laporan keuangan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
(Lanjutan)

No	Peneliti (Tahun)	Variabel	Hasil Penelitian
3	Kewo (2020)	<i>Good Government Governance</i> dan Pengendalian Internal	GGG berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan sector public, demikian juga pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan sector public.
4	Irafah (2020)	Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Audit, dan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah.	Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan, Peran Internal Audit berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan secara parsial, Kesuksesan penerapan SIKD tidak berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan secara parsial, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Audit, Kesuksesan penerapan SIKD berpengaruh secara simultan terhadap kualitas Laporan.
5	Philadhelphia (2020)	Standar akuntansi pemerintahan, <i>good governance</i>	Standar akuntansi pemerintahan, dan <i>good governance</i> mempengaruhi variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
(Lanjutan)

No	Peneliti (Tahun)	Variabel	Hasil Penelitian
6	Amalia (2019)	Pemahaman akuntansi, penerapan sistem Akuntansi Keuangan daerah, peran internal audit, dan Penerapan standar akuntansi pemerintah	Pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, peran internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
7	Gustina (2018)	Pengendalian internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	Sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, ketaatan aturan akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, dan sistem pengendalian intern dan ketaatan aturan akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
8	Nasrun (2018)	<i>Good Governance</i>	<i>Good governance</i> berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan ditemukan Ha diterima. Apabila diuji secara parsial maka, didapatkan bahwa <i>good governance</i> berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan. Hal ini terjadi mungkin karena hak pegawai diberikan secara proporsional.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
(Lanjutan)

No	Peneliti (Tahun)	Variabel	Hasil Penelitian
9	Mahardini (2018)	standar akuntansi pemerintahan dan kompetensi sumber daya manusia	Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah. Semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki, seperti tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan cenderung semakin baik.
10	Setiadi (2018)	Kepemimpinan dan kompetensi aparatur	Kepemimpinan dan kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap kualitas pelayanan publik. Semakin baik kepemimpinan dan kompetensi aparatur maka akan semakin baik kualitas pelayanan public.
11	Pujanira (2017)	Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
(Lanjutan)

No	Peneliti (Tahun)	Variabel	Hasil Penelitian
11	Paramita (2017)	Standar Pelaporan Keuangan, Kepemimpinan, Kompetensi, Peran Audit Internal dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi	Penerapan standar pelaporan keuangan, kompetensi, serta pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan, sedangkan karakteristik kepemimpinan dan peran audit internal tidak berpengaruh terhadap dihasilkannya laporan keuangan yang berkualitas.
12	Yuliani (2016)	kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan standar akuntansi pemerintahan, pengendalian intern, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan pengendalian intern tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
(Lanjutan)

No	Peneliti (Tahun)	Variabel	Hasil Penelitian
14	Azlim (2012)	<i>Good governance</i> dan Standar akuntansi pemerintahan	Variabel penerapan <i>good governance</i> dan Standar Akuntansi Pemerintahan secara simultan berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa penerapan <i>good governance</i> dan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan.

Sumber: data penelitian Terdahulu 2021

C. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Keuangan terhadap kualitas laporan Keuangan.

Penerapan standar pelaporan keuangan dalam teori agensi berperan dalam peningkatan profesionalitas laporan keuangan dalam lingkup monitoring cost. Biaya ini dikeluarkan oleh instansi untuk memantau, mengukur, dan mengamati penyusunan laporan keuangan OPD. Biaya monitoring berupa biaya penetapan kontrak kompensasi maupun biaya pelatihan dalam pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap pengelolaan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat harus memuat unsur-unsur

yang telah diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia adalah berbasis akrual. Basis akrual berarti mengakui dan mencatat peristiwa ekonomi serta melaporkan pada saat transaksi atau peristiwa ekonomi itu terjadi.

Penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah seperti hasil penelitian dari Martiningsih dan Inapty (2016) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan system pengendalian intern sebagai variable moderating. Latifah (2015) dan Pahlevi (2017) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Amalia, dkk (2019). Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1. Penerapan Standar Pelaporan Keuangan Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

2. Pengaruh Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Auditor internal berorientasi untuk membentuk laporan keuangan yang lebih berkualitas sesuai dengan SAP yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan pemeriksaan laporan keuangan untuk memastikan tidak terjadinya konflik akibat salah saji maupun manipulasi yang dapat menipu prinsipal selaku pengguna laporan keuangan. Konflik kepentingan yang timbul

antara prinsipal dengan agen karena agen enggan menyampaikan informasi yang tidak diharapkan oleh prinsipal. Auditor internal dalam teori agensi berperan sebagai penengah antara kedua belah pihak yakni agen dan prinsipal yang berbeda kepentingan. Auditor bertanggungjawab untuk memberikan penilaian atas kewajaran laporan keuangan.

Peran internal audit pernah diteliti oleh Nova (2015) dan Pratama (2017) yang menyatakan bahwa peran internal audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan Martiningsih dan Inapty (2016) menyatakan bahwa peran internal audit tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan system pengendalian intern sebagai variable moderating. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Yasma,dkk (2019). Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2. Peran Internal Audit Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

3. Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Sumber daya manusia merupakan elemen utama dibandingkan denganyang lain, seperti modal dan teknologi. Tantangan yang dihadapi olehperusahaan baik swasta maupun pemerintahan seperti perubahan lingkunganbisnis dan lingkungan kerja, menghendaki harus melakukan pengembangan sumber daya manusia agar tidak terjadi keusangan kemampuan sehinggadapat meningkatkan produktivitas.

Teori keagenan juga menyatakan bahwa agen bersikap oportunistik dan cenderung tidak menyukai resiko. Tanggung jawab yang ditunjukkan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif tidak hanya berupa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan wajar, tetapi juga bagaimana mereka mampu membuka akses untuk para pengguna laporan keuangan. Pemerintah daerah sebagai agen akan menghindari resiko berupa ketidakpercayaan stakeholders terhadap kinerja mereka. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan berusaha untuk menunjukkan bahwa kinerja mereka selama ini baik dan lebih transparan dalam pengelolaan keuangan daerah (Purnamasari dan Handayani, 2015).

Menurut Susilo (2002), sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi, misi dan tujuannya. Kapasitas atau kemampuan sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan pencapaian kinerja untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*) (Lismawati, 2012).

Kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan dalam penelitian Yuliani (2016) tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan dalam penelitian Puput (2017) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan

terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Paramita, dkk (2017). Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3. Peran Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

4. Pengaruh pemanfaatan Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan laporan keuangan akan mempengaruhi hasil dari laporan tersebut, dimana suatu Lembaga Pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal, tentunya akan menghasilkan laporan keuangan dimana informasi didalamnya memiliki nilai atau berkualitas, karena proses pelaporan keuangan menggunakan teknologi informasi memiliki risiko kesalahan yang kecil. praktek pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik serta baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan (faristina, 2011 dalam Nurillah 2014)

Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan Pemanfaatan informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan seperti hasil penelitian Sari (2017) menyatakan bahwa Pemanfaatan informasi akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Paramita, dkk (2017). Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4. Pemanfaatan informasi akuntansi berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

5. Pengaruh *Good Government Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Good Government governance dalam teori agensi merupakan penguatan sistem dan kelembagaan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan keuangan yang baik berdasarkan sistem akuntansi merupakan hal prioritas yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah.

Good Government governance merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh sektor pemerintah. Upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat ditampilkan dalam pencapaian kinerja sebagaimana komitmen yang telah ditetapkan. Melalui perbaikan kinerja, pemerintah dapat melakukan komunikasi dua arah dengan rakyatnya dalam rangka mencari titik temu pemecahan masalah-masalah yang terjadi. Hal tersebut menjadi isyarat bahwa untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang responsif, bebas KKN serta berkinerja, kondisi

akuntabilitas merupakan kondisi yang harus ada untuk dipenuhi. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, perlu dipadukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggungjawab, dan bebas dari KKN, yang dalam penerapannya adalah membuat suatu tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik. *Good government governance* adalah perubahan yang diharapkan akan melepaskan bangsa Indonesia dari kondisi keterpurukan (Zai, 2020). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nasrun (2018). Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5 : Penerapan Good Government Governance berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

6. Pengaruh kualitas aparatur sipil negara terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

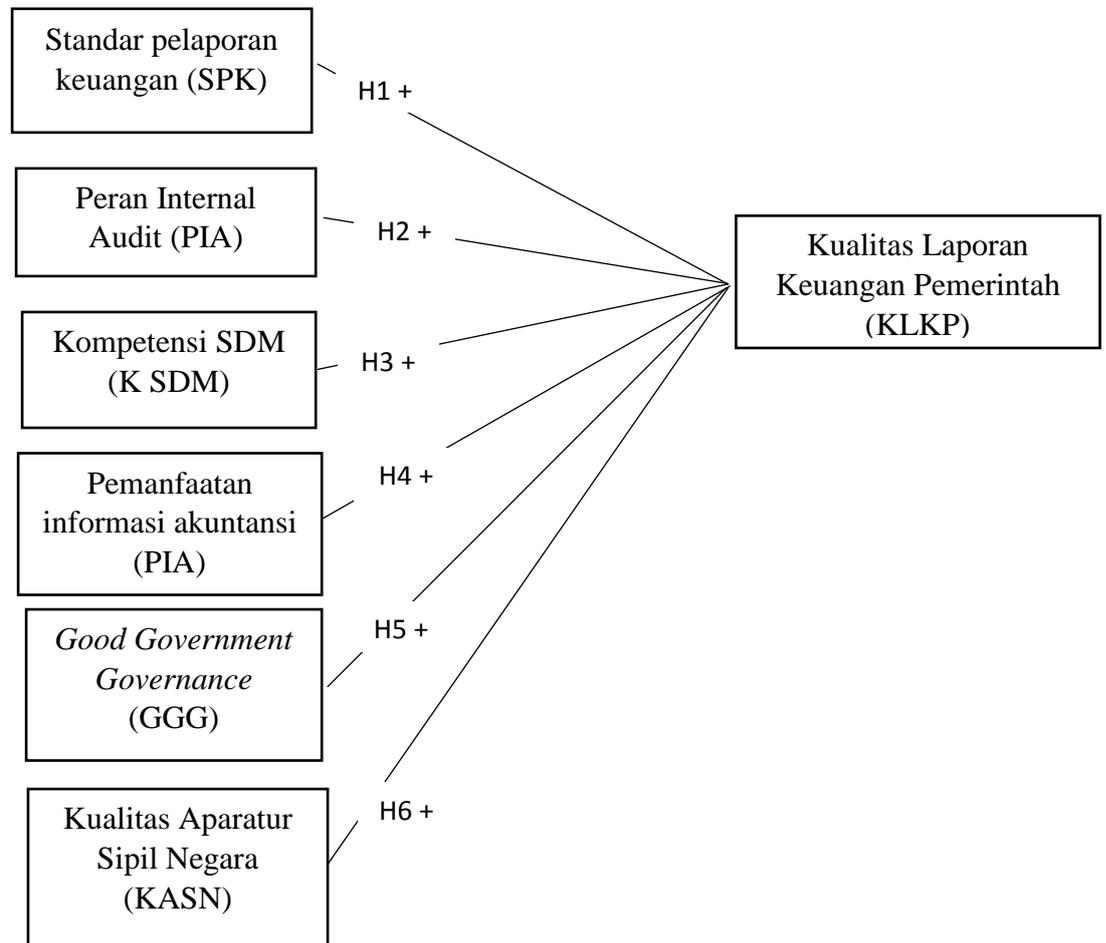
Kualitas kerja merupakan hasil yang dapat dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas – tugas yang dibebankan kepadanya, yang didasarkan pada kecakapan, pengalaman, kesungguhan serta waktu. Kualitas kerja Aparatur pemerintah pada dasarnya merupakan gabungan dari tiga faktor penting, yaitu :

1. Kemampuan, perangai, minat
2. Kejelasan dan penerimaan, serta
3. Tingkat motivasi

Kinerja seorang aparatur pemerintah dapat dilihat dari kemampuan, tingkat motivasi yang tinggi, bekerja keras, selalu melibatkan diri dalam mengatasi persoalan untuk memberikan solusi yang cemerlang atas segala bentuk kegiatan. Dengan kemampuan yang dimiliki, kualitas kerja aparatur dapat terlihat dari ketepatan, ketelitian, keterampilan dan kebersihan pekerjaan. Pada organisasi di sektor publik, pengukuran kinerja menjadi sangat penting karena pengukuran kinerja memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas public. Hasil kerjanya harus dilaporkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban kinerja. Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang berkompeten di bidang akuntansi mampu menyusun laporan keuangan sesuai SAP. Penerapan SAP membutuhkan kompetensi PNSD agar laporan keuangan yang disusun memenuhi kualifikasi informasi yang *useful*.

Pemahaman akuntansi pernah diteliti oleh Nova (2015) yang menyatakan bahwa pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan Defitri(2016), Pahlevi dan Mardiana (2017) menyatakan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

H6 : Pengaruh Kualitas Aparatur ASN berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan

D. Model Penelitian

Gambar 2.1
Model Penelitian

BAB III

METODA PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2014:13), pendekatan kuantitatif digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2014:80), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja pada OPD Kabupaten Temanggung. OPD Kabupaten Temanggung yang terdiri dari 23 organisasi Dinas Daerah dan Badan Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2014:85), *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Responden merupakan pegawai yang bekerja di Dinas Daerah dan Badan Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dalam struktur OPD Kabupaten Temanggung.
- b. Responden merupakan pegawai yang menjabat sebagai Kepala Subag, Kepala Keuangan, Bendahara, Staff Keuangan, Verifikator, dan Penganggaran.
- c. Pegawai telah bekerja minimal 2 tahun di bagian keuangan dalam lingkungan OPD Kabupaten Temanggung.

Pada struktur OPD Kabupaten Temanggung, sejumlah 18 Dinas Daerah terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Penanaman Modal, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Terdapat 7 Badan Daerah yang terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Penanggulangan

Bencana Daerah, Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah, dan Badan Pusat Statistik.

Berdasarkan kriteria pengambilan sampel, terdapat 6 pegawai yang memiliki jabatan sesuai kriteria sampel yang bekerja pada 25 organisasi Dinas Daerah dan Badan Daerah dalam OPD Kabupaten Temanggung, serta telah bekerja minimal 2 tahun di bagian keuangan dalam lingkungan OPD Kabupaten Temanggung. Melalui kriteria tersebut, maka diketahui bahwa sampel dalam penelitian ini berjumlah 150 orang.

C. Data Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data numerik yang diperoleh dari sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden penelitian yang lolos kriteria pengambilan sampel.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode survei atau *self-administered survey* dengan alat berupa angket atau kuesioner. Kuesioner dalam penelitian berisi seperangkat pernyataan yang merupakan penjabaran dari indikator variabel penelitian. Kuesioner kemudian dibagikan kepada responden yang merupakan sampel penelitian untuk diisi sehingga memperoleh data.

D. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

1. Variabel Kualitas Laporan Keuangan (KLK)

Variabel kualitas laporan keuangan diukur dengan menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Pujanira & Taman (2017) sebagai berikut.

- a. Relevan.
- b. Andal.
- c. Dapat dibandingkan.
- d. Dapat dipahami.

2. Variabel Penerapan Standar Pelaporan Keuangan (PSPK)

Variabel penerapan standar pelaporan keuangan diukur dengan menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Yulinda (2017) sebagai berikut.

- 1) Akuntabilitas.
- 2) Manajemen.
- 3) Transparansi.
- 4) Manfaat penerapan standar.
- 5) Peningkatan produktivitas.
- 6) Penyajian serta evaluasi kinerja.

3. Variabel Peran Internal Audit (PIAu)

Variabel peran internal audit diukur dengan menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Nugroho & Setyowati (2019) sebagai berikut.

- 1) Integritas.
- 2) Obyektifitas.
- 3) Kerahasiaan.
- 4) Kompetensi.

4. Variabel Kompetensi SDM (K)

Variabel kompetensi SDM diukur dengan menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Mahardini & Miranti (2018) sebagai berikut.

- 1) Kapasitas staf.
- 2) Tupoksi.
- 3) Pendidikan.
- 4) Training.

5. Variabel Pemanfaatan Informasi Akuntansi (PIAk)

Variabel pemanfaatan informasi akuntansi diukur dengan menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Nugroho & Setyowati (2019) sebagai berikut.

- 1) Sistem akuntansi sesuai dengan standar.
- 2) Kapasitas komputer.
- 3) Laporan keuangan terkomputerisasi.
- 4) *Software* teknologi sistem akuntansi yang digunakan.

6. Variabel *Good Government Governance* (GGG)

Variabel *Good Government Governance* diukur dengan menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Wijayanti (2020) sebagai berikut.

- 1) Konsep.
- 2) Pencapaian.
- 3) Pelaksanaan.
- 4) Pertanggungjawaban.

7. Variabel Kualitas ASN (KAA)

Variabel kualitas ASN diukur dengan menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Sutisman, dkk. (2020) sebagai berikut.

- 1) Ketepatan.
- 2) Ketelitian.
- 3) Keterampilan.
- 4) Kebersihan pekerjaan.

Pengukuran skala dalam kuesioner menggunakan skala Likert.

Penentuan nilai pada skor skala likert sebagai berikut.

Tabel 3.1 Penskoran Skala Likert

Skor/Bobot	Keterangan
5	Sangat Setuju
4	Setuju
3	Netral
2	Tidak Setuju
1	Sangat Tidak Setuju

Sumber: Sugiyono (2014:93)

E. Metoda Analisis Data

1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif berhubungan dengan menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu keadaan atau

fenomena. Statistik deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai demografi responden penelitian meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, lama bekerja dan lama menjabat. Statistik deskriptif juga digunakan untuk memberikan gambaran informasi data yang digunakan penelitian berupa jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, dan nilai standar deviasi.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali 2018:45). Pengujian validitas instrumen kuesioner penelitian ini menggunakan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) dengan model pengujian *Kaiser-Meyer-Olkin Measure Of Sampling Adequacy* (KMO MSA). Nilai KMO bervariasi dari 0 sampai dengan 1. Nilai yang dikehendaki harus $> 0,50$ dan *cross loading* $> 0,50$ untuk dapat dilakukan analisis faktor (Hair, dkk., 2016).

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2018:47). Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Pengukuran reliabilitas penelitian ini dilakukan dengan cara *One Shot* atau pengukuran sekali saja.

Pengukuran *one Shot* hanya sekali dilakukan dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Pengujian reliabilitas menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha*. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $\geq 0,70$ (Ghozali, 2018:48).

F. Pengujian Hipotesis

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independan terhadap satu variabel dependen (Ghozali, 2018:70). Analisis regresi linier berganda menunjukkan arah pengaruh tersebut. Pengujian regresi linier berganda digunakan dengan menggunakan program IBM SPSS 25 *for Windows*. Pengujian-pengujian tersebut didasarkan pada persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$KLK = \alpha + \beta_1PSPK + \beta_2PIAu + \beta_3K + \beta_6PIA + \beta_4GGG + \beta_5KAA + e$$

Keterangan:

KLK = Kualitas laporan keuangan

α = Konstanta

β_1PSPK = Koefisien regresi variabel penerapan standar pelaporan keuangan

β_{2PIAu}	= Koefisien regresi variabel peran internal audit
β_{3K}	= Koefisien regresi variabel kompetensi
β_{6PIA}	= Koefisien regresi variabel pemanfaatan informasi akuntansi
β_{4GGG}	= Koefisien regresi variabel <i>good government governance</i>
β_{5KAA}	= Koefisien regresi variabel kualitas aparatur ASN
e	= Error

2. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:166). Nilai koefisien determinasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai *Adjusted R Square* karena metode analisis yang digunakan adalah metode *enter*.

3. Uji F

Uji F pada dasarnya digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual (*goodness of fit*). Uji F menguji apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara

baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah *fit* atau tidak *fit*. Pengujian didasarkan pada daerah penerimaan dan daerah penolakan yang ditetapkan berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut.

a. Menentukan hipotesis

$H_0 : \beta = 0$, maka model tidak *fit*.

$H_a : \beta \neq 0$, maka model *fit*.

b. Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5% ($\alpha = 0,05$).

c. Menentukan nilai F_{hitung}

F_{hitung} didapatkan melalui *output* pengujian pada tabel Anova.

Untuk mencari nilai F_{tabel} ditentukan melalui perhitungan df_1 dan df_2 yang didapatkan melalui perhitungan sebagai berikut.

$$df_1 = (k-1) // df_2 = (n-k)$$

Keterangan:

n = jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian

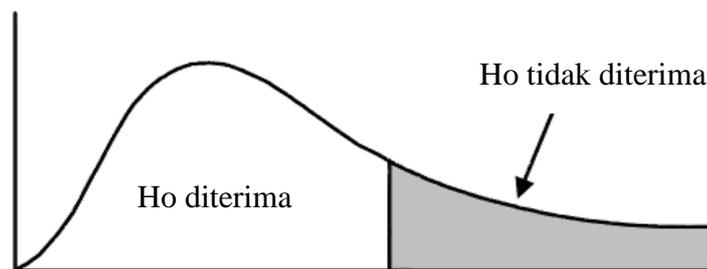
k = jumlah variabel penelitian

d. Kriteria pengujian hipotesis

1) Jika $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ maka H_a ditolak dan H_0 diterima.

2) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak.

Menurut Santoso (2018:378), daerah penerimaan dan penolakan dapat dilihat pada gambar 3.1.



Gambar 3.1 Kurva Uji F

4. Uji t

Uji t pada dasarnya menunjukkan pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Cara mendeteksi keberpengaruhannya dilakukan melalui langkah-langkah berikut ini.

a. Menentukan hipotesis

$H_0: \beta = 0$, maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

$H_a: \beta \neq 0$, maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

b. Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5% ($\alpha = 0,05$).

c. Menentukan nilai t_{hitung}

Nilai t_{hitung} didapatkan melalui output pengujian pada kolom t.

Untuk mencari nilai t_{tabel} ditentukan melalui perhitungan df (*degree of freedom*) yang didapatkan melalui perhitungan sebagai berikut.

$$df = n - 2$$

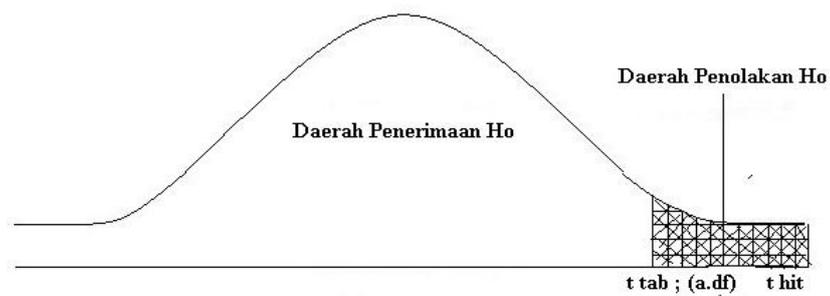
Keterangan :

n = jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian

d. Kriteria pengujian hipotesis

- 1) Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka H_a ditolak dan H_0 diterima.
- 2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak.

Menurut Santoso (2018:380), daerah penerimaan dan penolakan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.2 Kurva Uji t

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini untuk menguji secara empiris pengaruh penerapan standar pelaporan keuangan, peran internal audit, kompetensi, pemanfaatan informasi akuntansi, *good government governance*, dan kualitas aparatur sipil negara terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Kabupaten Temanggung. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dipaparkan, dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain: penerapan standar pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap variabel kualitas laporan keuangan. Peran internal audit berpengaruh positif terhadap variabel kualitas laporan keuangan. Kompetensi berpengaruh positif terhadap variabel kualitas laporan keuangan. *Good Government Governance* berpengaruh positif terhadap variabel kualitas laporan keuangan. Kualitas ASN tidak berpengaruh terhadap variabel kualitas laporan keuangan. Pemanfaatan informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap variabel kualitas laporan keuangan.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan di antaranya:

1. Kriteria sampel belum menggunakan status pendidikan bagi aparatur yang telah menempuh D3 menjadi S1. Hal ini menjadikan keterbatasan sehingga sampel tidak bersifat general terhadap objek penelitian.

2. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner secara satu pintu melalui bagian pelayanan. Hal ini disebabkan otonomi setiap OPD Kabupaten Temanggung yang melayani pengumpulan data secara satu pintu, sehingga diasumsikan terjadi kerancuan pernyataan serta dalam pengisian kuesioner secara asal-asalan tidak berdasarkan fakta di lapangan.
3. Variabel penerapan standar pelaporan keuangan, peran internal audit, kompetensi, *Good Government Governance*, kualitas aparatur ASN dan pemanfaatan informasi akuntansi mempengaruhi variabel kualitas laporan keuangan sebesar 76,1%. Masih terdapat sisa 23,9% yang dapat menjadi faktor dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan, sehingga perlu dilakukan penelitian dengan menambah variabel lainnya.

C. Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian di atas, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Penelitian berikutnya dapat menambahkan kriteria sampel status pendidikan D3 transfer S1, sehingga dapat menggambarkan dengan detail terkait demografi responden.
2. Penelitian berikutnya dalam pengumpulan data dapat disertai dengan metode wawancara atau terlibat tatap muka langsung dengan responden. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar responden lebih memahami pernyataan kuesioner yang diberikan oleh peneliti, sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat.

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan menambahkan variabel yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan, misalnya Sistem pengendalian Internal. Pengendalian internal akan mempengaruhi terlaksananya anggaran yang telah dibuat dan laporan keuangan yang dihasilkan akan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Azlim., Darwins., Usman Abu Bakar. (2017). Pengaruh Penerapan *Good Governance* Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan Skpd Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*.
- Erfiansyah, E., & Kurnia, I. (2018). Peranan Auditor Internal Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan (Survei Pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat). *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi*, 2(2), 144-160.
- Gustina, I . (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Skpd Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7.
- Irafah, S., Sari, E.N., & Muhyarsyah. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Audit, dan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 337-348.
- Jati, B.P. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal WAHANA*, 2(1), 1-14.
- Kewo, C.L., & Tanor, L.A.O. (2020). Apakah Good Government Governance dan Pengendalian Intern dapat Mempengaruhi Kualitas Akuntabilitas Laporan Keuangan Sektor Publik?. *Prosiding The 11th Industrial Research Workshop and National Seminar Bandung 26-27 Agustus 2020*, 930-935.
- Mahardini, N.Y., & Miranti, A. (2018). Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 22-32.
- Nasrun Muhammad (2018). Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan. *Journal of Equailibrium Universitas Muhammadiyah Makasar*.
- Nugroho, F.A., & Setyowati, W. (2019). Pengaruh Komitmen Organisasional, Sistem Informasi Akuntansi, dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(2), 125-134.

- Nuraini, Kirmizi & Kamaliah. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada OPD Pemerintah Provinsi Riau). *Pekbis Jurnal*, 11(3), 210-220.
- Nur Laila Y., & Rahmawati Dwi A (2016). Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Bisnis & Ekonomi, Volume 14, Nomor 1*.
- Philadelphiah, I.S., Suryaningsum, S., & Sriyono. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, Good Governance, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *J-ISCAN: Journal Of Islamic Accounting Research*, 2(1), 17-35.
- Prastiwi, L. (2016). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Pemerintah Daerah melalui Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Pujanira, P., & Taman, A. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. *Jurnal Nominal*, 6(2), 14-28.
- Rianisanti Meta D. (2017). Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Skpd Kabupaten Klaten). *IAIN Surakarta*.
- Sari Puput N (2017) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung. *Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Setiadi Asep (2017). Pengaruh Kepemimpinan Dan Kompetensi Aparatur Terhadap Kualitas Pelayanan Publik. *Journal of Management Review*.
- Sutisman, E., Rahmah, S., Pattiasina, V., & Noch, M.Y. (2020). Mediasi Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Pada Pengaruh Komitmen Organisasi, Kompetensi SDM dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jayapura. *Accounting Journal Universitas Yapis Papua*, 2(1), 1-11.

- Wijayanti. (2020). Pengaruh Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Simda sebagai Variabel Moderating Pemerintah di Kabupaten Pati. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Yasma Amalia H., & Noer Sasongko (2019). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Penerapan System Akuntansi Keuangan Daerah, Peran Internal Audit, Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada SKPD Di Pemerintah Kbupaten Sukoharjo). *The^{6th} Universitas Research Colloquium*.
- Yulinda Devi P., & Dahli Suhaeli (2017). Penerapan Standar Pelaporan Keuangan, Kepemimpinan, Kompetensi, Peran Audit Internal Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Pada Kualitas Informasi Laporan Keuangan. *The^{6th} Universitas Research Colloquium*.
- Zai, F.P., Purba, S., & Nainggolan, A. (2020). Pengaruh Penerapan Good Government Governance dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Studi Kasus pada BPKPAD Kabupaten Nias Barat). *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 5(1), 1-10